

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

No	Unit Kerja	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
SEKRETARIAT						
1	Kepala Sub Bagian Umum	Data pribadi PNS, meliputi : 1. Daftar riwayat hidup 2. Data kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak kekayaan pribadi yang menurut aturan tidak wajib dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dokumen pengelolaan kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. Kenaikan Gaji Berkala 3. Mutasi 4. Pensium 5. Administrasi kepegawaian	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Kepala Sub Bagian Umum	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Kepala Sub Bagian Umum	Data rencana penempatan ASN dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan pekerjaan	Sampai dengan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan
5	Kepala Sub Bagian Umum	informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf (a) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Menjaga keamanan informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana Menjaga kelancaran proses penegakan hukum	30 tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau setelah putusan pengadilan/inkrah

6	Kepala Sub Bagian Umum	Dokumen hasil sidang Baperjakat	Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyusunan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan kebijakan
7	Kepala Sub Bagian Umum	Momerandum dan disposisi pimpinan	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8	Kepala Sub Bagian Umum	Nota Dinas	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
9	Kepala Sub Bagian Umum	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
10	Kepala Sub Bagian Umum	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	sampai keluar hasil audit

11	Kepala Sub Bagian Umum	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	setelah LHP disetujui oleh DPRD dalam Sidang Paripurna
12	Kepala Sub Bagian Umum	Rincian Harga Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa	Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa

BIDANG KOPERASI						
1	Kepala Bidang Koperasi	Data Koperasi By name by adress	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
BIDANG USAHA KECIL TRANSMIGRASI ESDM						
1	Kepala Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral	Data UMKM by name by adrees	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

Karanganyar, April 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KARANGANYAR



ARIS MARTOPO, S.P., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700429 199603 1 003